

# TRIWULAN I LAPORAN KINERJA



Stasiun KIPM Yogyakarta  
Tahun 2025





**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**  
**BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU,**  
**HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN**  
**STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU,**  
**DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN YOGYAKARTA**

JALAN KENANGA NOMOR 26 MAGUWO HARJO, DEPOK, SLEMAN, DIY 55282  
TELEPON (0274) 489390, FAKSIMILE (0274) 489390 EXT 111  
LAMAN [www.kkp.go.id/stasiunkipmyogyakarta](http://www.kkp.go.id/stasiunkipmyogyakarta) SUREL [bkipmjogja@kkp.go.id](mailto:bkipmjogja@kkp.go.id)

10 April 2025

Yth. Sekretaris Badan Pengendalian dan Pengawasan  
Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan  
Cq. Tim Kerja Pelaporan Kinerja Sekretariat BPPMHKP

SURAT PENGANTAR

Nomor : B.110/SKIPM.JOG/KP.440/IV/2025

No	Naskah Yang Dikirim	Banyaknya	Keterangan
1	Bersama ini kami sampaikan :  Dokumen Laporan Kinerja Stasiun KIPM Yogyakarta Triwulan I Tahun 2025	Satu Berkas	

Diterima tanggal.....April 2025  
Penerima

.....

(.....)  
Nomor Telpon

Yogyakarta , 10 April 2025

Pt Kepala Stasiun KIPM Yogyakarta



*Maria Tresia Sundah*  
Maria Tresia Sundah

## KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Yogyakarta (LKj Stasiun KIPM Yogyakarta) Triwulan I Tahun 2025 disusun sebagai wujud pertanggungjawaban Stasiun KIPM Yogyakarta dalam penggunaan anggaran yang akuntabel untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan. Di dalam laporan ini diuraikan informasi terkait sasaran strategis organisasi dan indikator keberhasilan dalam rangka pencapaian visi dan misinya.

LKj ini disusun dengan mengacu pada Target Kinerja Stasiun KIPM Yogyakarta Triwulan I Tahun 2025 dan juga dengan memperhatikan Renstra 2020-2024, Renja 2025 serta Manual IKU 2025. Dalam setiap indikator terdapat penjelasan terkait definisi dan juga penjelasan untuk masing-masing capaiannya. Karena LKJ ini merupakan LKJ Triwulan I Tahun 2025 sehingga data capaian merupakan data triwulan I pada tahun anggaran 2025

Kami menyadari bahwa di dalam LKj ini sangat mungkin terdapat sejumlah kekurangan. Oleh karena itu, kami sangat mengharapkan masukan dan saran yang membangun untuk penyempurnaan di masa mendatang. Kami mengucapkan terimakasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan laporan kinerja ini.

Semoga LKj Stasiun KIPM Yogyakarta ini dapat memberikan manfaat untuk kita semua.

Yogyakarta, 10 April 2025  
Plt. Kepala Stasiun KIPM Yogyakarta



Maria Tresia Sundah

### **Intisari Laporan Kinerja**

*Laporan Kinerja (LKj) Stasiun KIPM Yogyakarta Triwulan I Tahun 2025 menyajikan capaian sasaran strategis Stasiun KIPM Yogyakarta pada periode Triwulan I Tahun 2025 yang tercermin dalam capaian Indikator Kinerja. Terhadap capaian tersebut dilakukan perbandingan terhadap target triwulanan, tahunan dan juga target Renstra 2020-2024 sebagai bahan analisis dan evaluasi lebih lanjut untuk menilai keberhasilan dalam perencanaan program dan kegiatan berikutnya.*

*Berdasarkan hasil analisis terhadap capaian kinerja BPPMHKP Yogyakarta Triwulan I Tahun 2025 dapat disimpulkan beberapa hal, antara lain:*

- *Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) Stasiun KIPM Yogyakarta Triwulan I Tahun 2025 adalah 112,89*
- *NPSS Stasiun KIPM Yogyakarta masuk dalam kategori istimewa.*
- *Seluruh capaian IKU dan IK pada periode Triwulan I Tahun 2025 telah tercapai sesuai dan melebihi target Triwulan I yang ditentukan.*
- *Realisasi penyerapan anggaran Stasiun KIPM Yogyakarta pada triwulan I tahun 2025 mencapai Rp 892.764.035 atau sebesar 18,30% dari pagu Rp 4.877.213.000*

## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Pembangunan kelautan dan perikanan memiliki permasalahan yang kompleks karena keterkaitannya dengan banyak sektor dan juga sensitif terhadap interaksi terutama dengan aspek lingkungan. Terdapat berbagai isu pengelolaan perikanan di Indonesia yang berpotensi mengancam kelestarian sumber daya ikan dan lingkungan, keberlanjutan mata pencaharian masyarakat di bidang perikanan, ketahanan pangan, dan pertumbuhan ekonomi yang bersumber dari pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2023 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 05/PERMEN-KP/2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (BPPMHKP) merupakan salah satu unit eselon I Kementerian Kelautan dan Perikanan. BPPMHKP mempunyai tugas menyelenggarakan pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan.

Pada tahun 2023 BKIPM mengalami transformasi kelembagaan dimana fungsi karantina ikan beralih ke Badan Karantina Indonesia sesuai perpres no 45 tahun 2023 tentang Badan Karantina Indonesia dan fungsi pengendalian dan pengawasan mutu ke Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (BPPMHKP) sesuai Perpres 38 tahun 2023 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan.

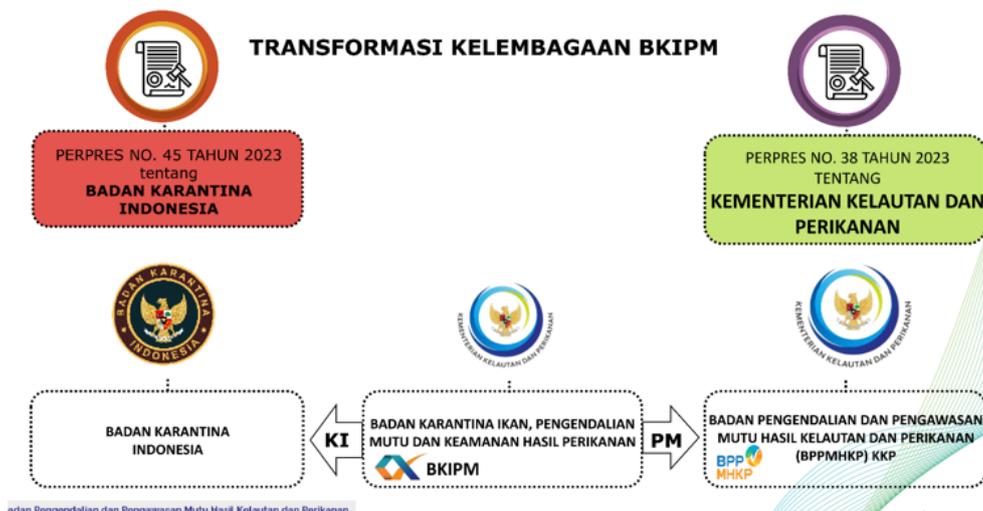
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, Stasiun KIPM Yogyakarta merupakan salah satu UPT BPPMHKP-Kementerian Kelautan dan Perikanan. BPPMHKP mempunyai tugas menyelenggarakan pengendalian mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, BPPMHKP dituntut untuk melaksanakan secara prudent, transparan, akuntabel, efektif dan efisien sesuai dengan prinsip-prinsip good governance, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap unit kerja di Kementerian atas penggunaan anggaran untuk mencapai Target Kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja. Laporan Kinerja disusun periodik baik triwulanan (LKj Interim) maupun tahunan (LKj

## Laporan Kinerja Triwulan I Tahun 2025

Tahunan). Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan Kinerja adalah pengukuran kinerja, evaluasi, serta pengungkapan (disclosure) secara memadai terhadap hasil capaian.

Laporan kinerja disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban BPPMHKP Yogyakarta dalam melaksanakan tugas dan fungsi selama triwulan I Tahun 2025 untuk mencapai visi dan misi BPPMHKP Yogyakarta. Di samping itu, juga sebagai alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja setiap pegawai di lingkungan BPPMHKP Yogyakarta serta sarana untuk mendapatkan masukan bagi stakeholder demi perbaikan kinerja BPPMHKP Yogyakarta. Selain untuk memenuhi prinsip akuntabilitas, Laporan Kinerja tersebut juga merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah



Gambar 1. Transformasi Kelembagaan BKIPM

### 1.2. Tujuan

Laporan Kinerja Stasiun KIPM Yogyakarta Triwulan I Tahun 2025 merupakan salah satu bentuk media informasi atas pelaksanaan program/kegiatan dan pengelolaan anggaran Stasiun KIPM Yogyakarta pada periode tersebut. Adapun tujuan penyusunan Laporan Kinerja Stasiun KIPM Yogyakarta Triwulan I Tahun 2025 adalah untuk menilai dan mengevaluasi pencapaian kinerja Stasiun KIPM Yogyakarta pada Triwulan I Tahun 2025 dengan berdasarkan capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dan rekomendasi dari Inspektorat Jenderal. Kemudian berdasarkan hasil evaluasi tersebut dirumuskan suatu

kesimpulan yang dapat menjadi bahan masukan dan referensi perbaikan kinerja triwulan berikutnya.

### **1.3. Kedudukan, Tugas dan Fungsi**

Dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, BPPMHKP mempunyai tugas menyelenggarakan pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan. Dalam melaksanakan tugasnya, BPPMHKP menyelenggarakan fungsi :

1. Penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan;
2. Pelaksanaan pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan;
3. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan;
4. Pelaksanaan administrasi Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Unit Pelaksana Teknis Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan menyelenggarakan fungsi saat ini masih sesuai regulasi yang lama dikarenakan SOTK UPT belum terbit :

1. Penyusunan pemantauan, dan evaluasi rencana, program, dan anggaran, serta pelaporan dibidang pelayanan pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan;
2. Pelaksanaan pengujian mutu produk hasil kelautan dan perikanan;
3. Pelaksanaan sertifikasi mutu dan keamanan hasil perikanan;
4. Pelaksanaan inspeksi, verifikasi, surveilan, audit, dan pengambilan contoh produk hasil kelautan dan perikanan di unit pengolahan ikan dalam rangka sertifikasi penerapan program manajemen mutu terpadu;
5. Penerapan sistem manajemen mutu pelayanan operasional dan laboratorium;
6. Penindakan pelanggaran pengendalian mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan;
7. Pengumpulan, pengolahan data dan informasi dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan;
8. Pelaksanaan urusan ketatausahaan

## Laporan Kinerja Triwulan I Tahun 2025

- a. pelaksanaan pemantauan terhadap hama dan penyakit ikan karantina, mutu dan keamanan hasil perikanan, dan keamanan hayati ikan;
- b. pelaksanaan pengawasan terhadap hama dan penyakit ikan karantina dan keamanan hayati ikan;
- c. pelaksanaan surveilan terhadap hama dan penyakit ikan karantina dan keamanan hayati ikan;
- d. pelaksanaan inspeksi, verifikasi, surveilan, audit, dan pengambilan contoh ikan dan hasil perikanan di unit pengolahan ikan dalam rangka sertifikasi penerapan program manajemen mutu terpadu;
- e. penerapan sistem manajemen mutu pelayanan operasional dan laboratorium;
- f. penindakan pelanggaran perkarantinaan ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan, dan keamanan hayati ikan;
- g. pengumpulan, pengolahan data dan informasi perkarantinaan ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan, dan keamanan hayati ikan;
- h. pelaksanaan urusan ketatausahaan.



**Gambar 2. Kantor dan Wilayah Kerja BPPMHKP Yogyakarta**

Setiap unsur di lingkup Unit Pelaksana Teknis BPPMHKP dalam melaksanakan tugas harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkup Unit Pelaksana Teknis BPPMHKP maupun dalam hubungan antar instansi baik pusat maupun daerah. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi tersebut, Stasiun KIPM Yogyakarta memiliki sumber daya manusia total sebanyak 32 orang dengan rincian 17

ASN, 4 PPNP dan 10 Outsourcing. ASN di Stasiun KIPM Yogyakarta terdiri dari 1 pejabat struktural, 11 pejabat fungsional tertentu dan 5 fungsional umum.

**Tabel 1. Rincian SDM Stasiun KIPM Yogyakarta sebagai berikut**

Rincian SDM Stasiun KIPM Yogyakarta
<b>Jabatan Fungsional Tertentu (11)</b> - Inspektur Mutu Hasil Perikanan Muda (2) - Inspektur Mutu Hasil Perikanan Pertama (1) - Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan Mahir (3) - Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan Penyelia (1) - Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan Terampil (1) - Pranata Keuangan APBN Penyelia (1) - Pranata SDM Mahir (1) - Penata Laksana Barang Terampil (1)
<b>Jabatan Fungsional Umum (5),</b> Analis SDMA (1), Pengadministrasi Umum (1), Pengelola Data (1), Penyusun LK (1), Pengadministrasi Persuratan (1)
<b>PPNPN (4)</b> Pramubakti Lab (3), Pramubakti IT (1),
<b>Outsourcing (10)</b> Pengolah Data (1), Cleaning Service (2), Driver (1), Security (6)

Susunan organisasi Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan terdiri atas:

- a. Urusan Umum; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.



**Gambar 3. Struktur Organisasi Stasiun KIPM Yogyakarta berdasarkan Permen KP Nomor Tahun 2020**

Urusan umum mempunyai tugas melakukan penyusunan pemantauan, dan evaluasi rencana, program, dan anggaran, pelaporan, urusan keuangan, hubungan masyarakat, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, persuratan, kearsipan, dokumentasi, rumah tangga, serta pengelolaan barang milik negara dan perlengkapannya.

Untuk dapat mengkoordinasi kegiatan-kegiatan yang ada, Kepala UPT memerlukan personel dibawahnya yang dapat melakukan koordinasi kepada seluruh pegawai dalam pembagian ketugasan yaitu oleh Tim Kerja Pengendalian Kesehatan Ikan, Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan, Tim Kerja Pengawasan Kesehatan Ikan, Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan, Tim Kerja Penerapan Standar dan Metode Uji Kesehatan Ikan, Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan dan Tim Kerja Dukungan Manajerial

Sedangkan Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis BPPMHKP sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.

### 1.4. Sistematika Pelaporan

Sistematika penyajian LKj Stasiun KIPM Yogyakarta sebagai berikut:

- I. Bab I - Pendahuluan, menyajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi.
- II. Bab II - Perencanaan Kinerja, menguraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.
- III. Bab III - Akuntabilitas Kinerja, menjelaskan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi yang digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.
- IV. Bab IV - Penutup, menjelaskan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

## BAB II PERENCANAAN KINERJA

### 2.1. Visi dan Misi

Visi Stasiun KIPM Yogyakarta ditetapkan sesuai dengan Visi BPPMHKP yang selaras dengan visi KKP 2020-2024 yaitu untuk mendukung visi Presiden “Terwujudnya Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Sejahtera dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan”. Mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5 Tahun 2024, sesuai dengan tugas, fungsi dan wewenang yang dimandatkan, maka Stasiun KIPM Yogyakarta sebagai UPT BKIPM menjalankan 3 (tiga) dari 4 (empat) Misi KKP dalam Renstra 2020 – 2024, yaitu:

1. Misi ke-2 yakni Struktur Ekonomi Yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing melalui Peningkatan Kontribusi Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan terhadap Perekonomian Nasional.
2. Misi ke-4 yakni Mencapai Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan melalui Peningkatan Kelestarian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.
3. Misi ke-8 yakni Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya melalui Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan di KKP.

Selaku salah satu UPT dari BKIPM, Stasiun KIPM Yogyakarta harus mewujudkan visi dan misi yang telah dijabarkan di atas.

Kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan diarahkan untuk mendorong peningkatan kontribusi sektor kelautan dan perikanan dalam pertumbuhan ekonomi, serta mendorong peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas pangan produk perikanan yang berkelanjutan, pengelolaan kemaritiman, kelautan dan perikanan melalui peningkatan produksi, produktivitas dan peningkatan nilai tambah, pengembangan industri perikanan hulu-hilir untuk meningkatkan daya saing, serta peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik di KKP.

Dalam Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan 2020 – 2024, telah ditetapkan 4 (empat) tujuan pembangunan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Stasiun KIPM Yogyakarta sebagai UPT BPPMHKP turut bertanggung-jawab pada pencapaian 4 (empat) tujuan Kementerian Kelautan dan Perikanan yaitu:

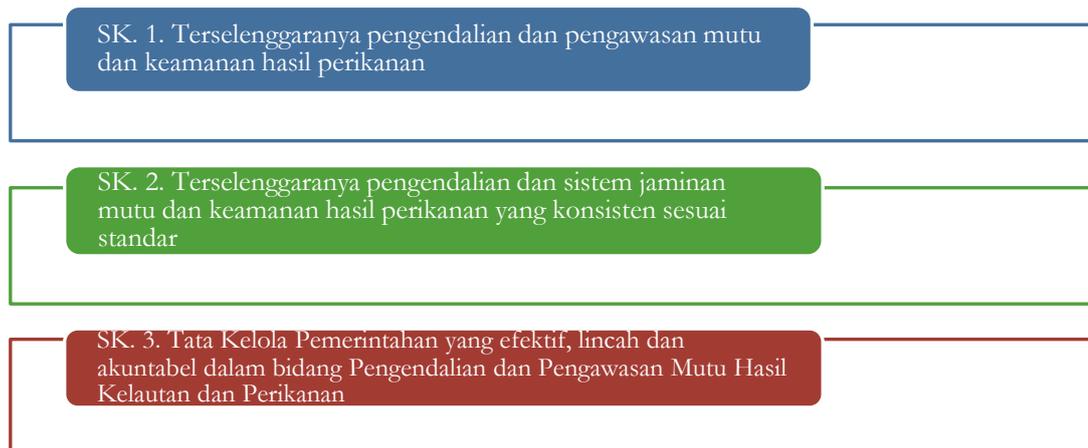
1. Meningkatnya kontribusi ekonomi sektor kelautan dan perikanan dengan mendukung pengelolaan kelautan dan perikanan yang optimal melalui penjaminan kesehatan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan, serta keamanan hayati ikan sebagai upaya tindakan perlindungan terhadap kesehatan manusia, ikan dan lingkungan,

2. Meningkatnya nilai tambah dengan mendukung berkembangnya industri perikanan hulu-hilir melalui standardisasi dan layanan sertifikasi dalam rangka peningkatan daya saing dan meningkatnya kinerja ekspor produk perikanan,
3. Meningkatnya pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang integratif,
4. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik.

## 2.2. Sasaran, Indikator dan Target Kinerja

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran telah ditetapkan indikator sasaran sebagai ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan. Setiap indikator sasaran disertai rencana tingkat capaian (target) masing-masing. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam rencana strategis. Dengan demikian, setiap tujuan yang ditetapkan memiliki indikator yang terukur.

Stasiun KIPM Yogyakarta telah menyusun Rencana Strategis Tahun 2020-2024. Rencana strategis tersebut dijabarkan ke dalam Peta Strategi Stasiun KIPM Yogyakarta (Gambar 2.1). Peta Strategi adalah suatu *dashboard* yang memetakan sasaran strategi organisasi dalam suatu kerangka hubungan sebab akibat yang menggambarkan keseluruhan perjalanan strategi organisasi. Peta Strategi kemudian diturunkan menjadi sasaran kegiatan, berikut adalah sasaran kegiatan pada Stasiun KIPM Yogyakarta



**Gambar 4. Sasaran Kegiatan Stasiun KIPM Yogyakarta Tahun 2024**

Sasaran kegiatan Stasiun KIPM Yogyakarta tersebut selanjutnya diturunkan ke dalam indikator dan target kinerja yang akan dicapai selama Tahun Anggaran 2025 baik dalam satu tahun sekaligus maupun setiap triwulannya. Indikator Kinerja Kegiatan telah



## Laporan Kinerja Triwulan I Tahun 2025

ditetapkan secara spesifik untuk mengukur pencapaian kinerja berkaitan dengan sasaran program (*outcome*). Pencapaian indikator kinerja yang sudah ditetapkan adalah suatu bentuk keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis sebagaimana yang telah direncanakan. Indikator kinerja dari setiap sasaran strategis dan target kinerja Stasiun KIPM Yogyakarta dapat dilihat pada tabel di bawah.

Pada Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2025 Stasiun KIPM Yogyakarta, jumlah indikator kinerja kegiatan berjumlah 15 Indikator Kinerja Utama (IKU).

Perjanjian Kinerja 2025 Stasiun KIPM Yogyakarta

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
SK.1	Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan Perikanan	1.	Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup UPT Stasiun KIPM Yogyakarta (%)	70
		2.	Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Pasca Panen yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup UPT Stasiun KIPM Yogyakarta (%)	70
		3.	Lokasi Pengawasan Mutu Hasil Perikanan sektor produksi pasca panen lingkup UPT Stasiun KIPM Yogyakarta (lokasi)	2
		4.	Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan memenuhi syarat mutu dan diterima oleh negara tujuan ekspor lingkup UPT Stasiun KIPM Yogyakarta (%)	99
SK.2	Terselenggaranya Pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang konsisten sesuai standar	5.	Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu laboratorium lingkup UPT Stasiun KIPM Yogyakarta (Nilai)	75
		6.	Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu lembaga inspeksi lingkup UPT Stasiun KIPM Yogyakarta (Nilai)	75
SK.3	Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	7.	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup UPT Stasiun KIPM Yogyakarta (Nilai)	92
		8.	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran lingkup UPT Stasiun KIPM Yogyakarta (Nilai)	71,5
		9.	Persentase Penyelesaian Temuan BPK lingkup UPT Stasiun KIPM Yogyakarta (%)	100
		10.	Indeks Profesionalitas ASN lingkup UPT Stasiun KIPM Yogyakarta (Indeks)	87
		11.	Penilaian Mandiri SAKIP lingkup UPT Stasiun KIPM Yogyakarta (Nilai)	86
		12.	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup UPT Stasiun KIPM Yogyakarta (%)	85
		13.	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP lingkup UPT Stasiun KIPM Yogyakarta (%)	76
		14.	Persentase pemenuhan dokumen pembangunan zona integritas lingkup UPT Stasiun KIPM Yogyakarta (%)	70
15.	Survey Kepuasan Masyarakat lingkup UPT Stasiun KIPM Yogyakarta (Nilai)	88		

## Laporan Kinerja Triwulan I Tahun 2025

Pencapaian Kinerja Organisasi dilihat dari Total Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) dimana rentang nilainya adalah 0 – 120%. NPSS diperoleh melalui serangkaian penghitungan dengan menghitung pencapaian seluruh Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja (IK) yang telah dituangkan dalam Perjanjian Kinerja.

$$\text{NPSS} = \frac{\sum \% \text{Capaian IKU}}{\sum \text{IKU yg mempunyai target pada triwulan tersebut}}$$

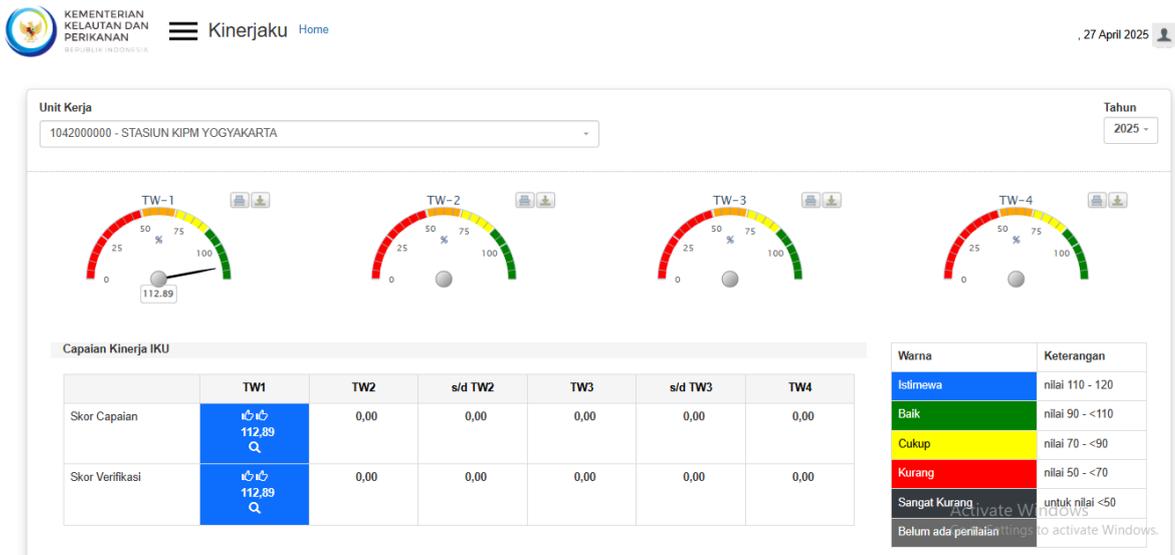
Adapun keterangan status NPSS pada aplikasi Kinerjaku adalah sebagai berikut:

SANGAT BAIK	$\geq 110 - 120 + \text{IDE BARU}$
BAIK	$\geq 90 - < 120$
CUKUP	$\geq 70 - < 90$
KURANG	$\geq 50 - < 70$
SANGAT KURANG	$\leq 50$
BELUM ADA PENILAIAN	
BELUM INPUT CAPAIAN	

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja

Dalam pelaksanaannya, metode pengukuran kinerja menggunakan aplikasi database online [www.kinerjaku.kkp.go.id](http://www.kinerjaku.kkp.go.id). Proses penghitungan kinerja menggunakan Manual IKU yang telah disusun dan disepakati sebelumnya, serta menilai capaian kinerja dari kegiatan-kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja program.



Gambar 5. Hasil Pengukuran Kinerja pada aplikasi Kinerjaku KKP

Berdasarkan aplikasi Kinerjaku, Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) Stasiun KIPM Yogyakarta pada Triwulan I Tahun 2025 yaitu 112,89 dalam kriteria istimewa. Untuk memperoleh kriteria baik, NPSS minimal adalah 90 - ≤ 110 dan kriteria istimewa nilai 110 – 120.

Capaian Indikator Kinerja di masing-masing Sasaran Kegiatan Stasiun KIPM Yogyakarta pada Triwulan I Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2 Capaian Kinerja Stasiun KIPM Yogyakarta Triwulan I Tahun 2025



NKO Maret - 2025 Download

Unit Kerja : STASIUN KIPM YOGYAKARTA

Skor Kinerja : **112.89**

- Pastikan pada data dukung sudah terdapat tanda ✓
- Jika masih terdapat tanda ✘, silahkan file-nya di upload kembali, dengan cara pilih tombol 🗑
- Jika masih ada data dukung lain, data dukung masih dapat ditambahkan dengan cara pilih tombol Tambah Data Dukung+

Kode	Sasaran/Indikator Kinerja	Satuan	Polarisasi	Perhitungan	Target 2025	Target Maret	Capaian Maret	%	Target s/d Maret	Capaian s/d Maret	%	Tgl Input
S.01	<b>Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan Perikanan</b>						<b>110,25</b>			<b>110,25</b>		
IKS.1	Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup UPT Stasiun KIPM Yogyakarta (%) Data Dukung1 ✓   Data Dukung2 ✓   🗑 Tambah Data Dukung+	persen	Maximize	Nilai Posisi Akhir	70,00	70,00	100,00	120,00	70,00	100,00	120,00	14-Apr-2025 11:48
IKS.2	Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Pasca Panen yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup UPT Stasiun KIPM Yogyakarta (%) Data Dukung1 ✓   🗑   Data Dukung2 ✓   🗑   Data Dukung3 ✓   🗑 Tambah Data Dukung+	persen	Maximize	Nilai Posisi Akhir	70,00	70,00	96,00	120,00	70,00	96,00	120,00	14-Apr-2025 11:48
IKS.3	Lokasi Pengawasan Mutu Hasil Perikanan sektor produksi pasca panen lingkup UPT Stasiun KIPM Yogyakarta (lokasi) Data Dukung1 ✓   🗑   Data Dukung2 ✓   🗑   Data Dukung3 ✓   🗑 Tambah Data Dukung+	lokasi	Maximize	Akumulasi	2,00	1,00	1,00	100,00	1,00	1,00	100,00	14-Apr-2025 11:48
IKS.4	Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan memenuhi syarat mutu dan diterima oleh negara tujuan ekspor lingkup UPT Stasiun KIPM Yogyakarta (%) Data Dukung1 ✓   🗑   Data Dukung2 ✓   🗑   Tambah Data Dukung+	persen	Maximize	Nilai Posisi Akhir	99,00	99,00	100,00	101,01	99,00	100,00	101,01	14-Apr-2025 11:48
S.02	<b>Terselenggaranya Pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang konsisten sesuai standar</b>											
IKS.02.1	Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu laboratorium lingkup UPT Stasiun KIPM Yogyakarta (Nilai) Tambah Data Dukung+	Nilai	Maximize	Nilai Posisi Akhir	75,00	0,00			0,00	0,00		14-Apr-2025 11:48
IKS.02.2	Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu lembaga inspeksi lingkup UPT Stasiun KIPM Yogyakarta (Nilai) Tambah Data Dukung+	Nilai	Maximize	Nilai Posisi Akhir	75,00	0,00			0,00	0,00		14-Apr-2025 11:48
S.03	<b>Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan</b>						<b>115,52</b>			<b>115,52</b>		
IKS.03.1	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup UPT Stasiun KIPM Yogyakarta (Nilai) Tambah Data Dukung+	Nilai	Maximize	Nilai Posisi Akhir	92,00	0,00			0,00	0,00		14-Apr-2025 11:48
IKS.03.2	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran lingkup UPT Stasiun KIPM Yogyakarta (Nilai) Tambah Data Dukung+	Nilai	Maximize	Nilai Posisi Akhir	71,50	0,00			0,00	0,00		14-Apr-2025 11:48
IKS.03.3	Persentase Penyelesaian Temuan BPK lingkup UPT Stasiun KIPM Yogyakarta (%) Tambah Data Dukung+	persen	Maximize	Nilai Posisi Akhir	100,00	0,00			0,00	0,00		14-Apr-2025 11:48
IKS.03.4	Indeks Profesionalitas ASN lingkup UPT Stasiun KIPM Yogyakarta (Indeks) Tambah Data Dukung+	Nilai	Maximize	Nilai Posisi Akhir	87,00	0,00			0,00	0,00		14-Apr-2025 11:48
IKS.03.5	Penilaian Mandiri SAKIP lingkup UPT Stasiun KIPM Yogyakarta (Nilai) Tambah Data Dukung+	Nilai	Maximize	Nilai Posisi Akhir	86,00	0,00			0,00	0,00		14-Apr-2025 11:48
IKS.03.6	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup UPT Stasiun KIPM Yogyakarta (%) Data Dukung1 ✓   🗑 Tambah Data Dukung+	Nilai	Maximize	Rata-rata	85,00	85,00	100,00	117,65	85,00	100,00	117,65	14-Apr-2025 11:48
IKS.03.7	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang ditumukkan pada SIRUP lingkup UPT Stasiun KIPM Yogyakarta (%) Data Dukung1 ✓   🗑 Tambah Data Dukung+	Nilai	Maximize	Nilai Posisi Akhir	76,00	76,00	100,00	120,00	76,00	100,00	120,00	14-Apr-2025 11:48
IKS.03.8	Persentase pemenuhan dokumen pembangunan zona integritas lingkup UPT Stasiun KIPM Yogyakarta (%) Tambah Data Dukung+	Nilai	Maximize	Nilai Posisi Akhir	70,00	0,00			0,00	0,00		14-Apr-2025 11:48
IKS.03.9	Survey Kepuasan Masyarakat lingkup UPT Stasiun KIPM Yogyakarta (Nilai) Data Dukung1 ✓   🗑   Data Dukung2 ✓   🗑   Tambah Data Dukung+	Nilai	Maximize	Nilai Posisi Akhir	88,00	88,00	95,83	108,90	88,00	95,83	108,90	14-Apr-2025 11:48

Tutup

Tabel 3.2 Capaian Sasaran Kegiatan Triwulan I Tahun 2025

Kode	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2025	Triwulan I			% terhadap Target 2025	Renstra 2020-2024		Realisasi Tahun Sebelumnya	
				Target	Realisasi	%		Target 2024	% Capaian thd Target 2024	Realisasi 2024	% Capaian thd Relalisasi 2024
<b>SK 1. Terselenggaranya Pengendalian dan pengawasan mutu Hasil Kelautan Perikanan</b>											
IK1	Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Stasiun KIPM Yogyakarta (%)	%	70	70	100	120	120	70	120	100	100
IK2	Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Stasiun KIPM Yogyakarta (%)	%	70	70	96	120	120	70	120	86,36	111,17
IK3	Lokasi Pengawasan Mutu Hasil Perikanan sektor produksi pasca panen lingkup UPT Stasiun KIPM Yogyakarta (lokasi)	Lokasi	2	1	1	100	50	6 lokasi	16,6	6	16,6
IK4	Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor lingkup UPT Stasiun KIPM Yogyakarta (%)	%	99	99	100	101,1	101,1	99	101,1	100	101,1
<b>SK 2. Terselenggaranya Pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang konsisten sesuai standar</b>											
IK5	Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu laboratorium lingkup UPT Stasiun KIPM Yogyakarta (Nilai)	%	75	-	-	-	-	75	-	100	-
IK6	Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu lembaga inspeksi lingkup UPT Stasiun KIPM Yogyakarta (Nilai)	%	75	-	-	-	-	75	-	100	-
<b>SK3. Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan</b>											
IK7	Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) lingkup UPT Stasiun KIPM Yogyakarta	Nilai	92	-	-	-	-	93,76	-	93,94	-
IK8	Nilai Kinerja Perencanaan	Nilai	71,50	-	-	-	-	71	-	92,50	-

## Laporan Kinerja Triwulan I Tahun 2025

	Anggaran lingkup UPT Stasiun KIPM Yogyakarta										
<b>IK9</b>	Presentase Penyelesaian Temuan BPK lingkup UPT Stasiun KIPM Yogyakarta (%)	%	100	-	-	-	-	100	-	100	-
<b>IK10</b>	Indeks Profesionalitas ASN lingkup UPT Stasiun KIPM Yogyakarta	Indeks	87	-	-	-	-	86	-	90,35	-
<b>IK11</b>	Penilaian Mandiri SAKIP lingkup UPT Stasiun KIPM Yogyakarta (Nilai)	Nilai	86	-	-	-	-	82	-	83,05	-
<b>IK12</b>	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup UPT Stasiun KIPM Yogyakarta (%)	%	85	85	100	117,65	117,65	80	120	100	100
<b>IK13</b>	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP lingkup UPT Stasiun KIPM Yogyakarta (%)	%	76	76	100	120	120	80	120	84,34	118,56
<b>IK14</b>	Persentase pemenuhan dokumen pembangunan zona integritas lingkup UPT Stasiun KIPM Yogyakarta (%)	%	70	-	-	-	-	IKU Baru	-	IKU Baru	-
<b>IK 15</b>	Survey Kepuasan Masyarakat lingkup UPT Stasiun KIPM Yogyakarta (Nilai)	Nilai	88	88	95,83	108,9	108,9	88,31	108,51	97,44	98,34

\*Maksimal realisasi adalah 120%

### 3.2. Analisis dan Evaluasi

Capaian kinerja berdasarkan sasaran kegiatan secara lebih detail menurut indikator kerjanya dijelaskan sebagai berikut (dengan perhitungan nilai posisi akhir)

#### Sasaran kegiatan 1.

#### Terselenggaranya Pengendalian dan pengawasan mutu Hasil Kelautan dan Perikanan

PP No 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Resiko, salah satunya mengatur persyaratan dan/atau kewajiban Perizinan Berusaha Berbasis Resiko berupa PB UMKU. Pasal 13 dan 14, pelaku usaha dalam melakukan kegiatan usaha wajib memenuhi Perizinan Berusaha berupa NIB dan Sertifikat Standar. BPPMHKP melaksanakan penerbitan 9 sertifikat standar yang termasuk PB UMKU.

#### Stasiun KIPM Yogyakarta

## Layanan Sertifikasi BPPMHKP

**Layanan Sertifikasi BPPMHKP**

PP No 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, salah mengatur persyaratan dan/atau kewajiban Perizinan Berusaha Berbasis Risiko berupa PB UMKU. Pasal 13 dan 14, Pelaku Usaha dalam melakukan kegiatan usaha wajib memenuhi Perizinan Berusaha berupa NIB dan Sertifikat Standar. BPPMHKP melaksanakan penerbitan 9 sertifikat standar yang termasuk PB UMKU, yang terbagi menjadi:

Sertifikasi Produk Perikanan <b>Primer</b>			Sertifikasi Produk Perikanan <b>Pascapanen</b>	
1 <b>CBIB</b> Cara Budidaya Ikan yang Baik Acuan: <b>SNI 8228.1:2015</b>	2 <b>CPIB</b> Cara Pembenihan Ikan yang Baik Acuan: <b>SNI 8035:2019</b>	3 <b>CPIB Kapal</b> Cara Penanganan Ikan yang Baik di atas kapal Acuan: <b>SNI 8087:2014</b>	7 <b>SKP</b> Sertifikat Kelayakan Pengolahan Acuan: <b>SNI CXC 1:1969</b> (Ditetapkan BSN tahun 2007) Permen KP No. 17 Tahun 2019	8 <b>HACCP</b> Sistem Analisa Bahaya dan Pengendalian Titik Kritis Acuan: <b>SNI CXC 1:1969</b> (Ditetapkan BSN tahun 2007)
4 <b>CPPIB</b> Cara Pembuatan Pakan Ikan yang Baik Acuan: <b>SNI masing-masing komoditas</b>	5 <b>CPOIB</b> Cara Pembuatan Obat Ikan yang Baik Acuan: <b>Perdirjen Perikanan Budidaya No. 187 tahun 2023</b>	6 <b>CDOIB</b> Cara Distribusi Obat Ikan yang Baik Acuan: <b>Perdirjen Perikanan Budidaya No. 186 tahun 2023</b>	9 <b>SPDI</b> Sertifikat Pengelolaan Distribusi Ikan Acuan: <b>PP 27 Tahun 2021, Permen KP 58 Tahun 2021 dan PP 57 tahun 2015</b>	<b>Fungsi Lain</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Monitoring Mutu Hasil Perikanan dan Residu Perairan</li> <li>• Sertifikasi Penerbitan HC Mutu Ekspor dan Pengendalian Impor</li> <li>• Pengelolaan Laboratorium Pengujian</li> </ul>

### IK1 Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Stasiun KIPM Yogyakarta (%)

Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor primer yang memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan adalah ukuran dalam menilai seberapa besar volume atau jumlah produk hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer perikanan budidaya meliputi CBIB, CPIB, CPPIB, CPOIB, CDOIB dan perikanan tangkap meliputi CPIB di kapal yang telah sesuai dengan standar, kriteria keamanan pangan yang ditetapkan oleh Otoritas Kompeten.

Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan adalah upaya pencegahan dan pengendalian yang harus diperhatikan dan dilakukan sejak pra produksi sampai dengan pemasaran untuk menghasilkan hasil kelautan dan perikanan yang bermutu dan aman bagi kesehatan manusia. Standar Mutu dan Keamanan Pangan Hasil Kelautan dan Perikanan dicapai melalui penerapan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan.

Sektor produksi perikanan primer merujuk kepada kegiatan yang berfokus pada pengambilan dan pengelolaan sumberdaya hayati perairan yang meliputi penangkapan ikan, budidaya dan pengumpulan hasil laut lainnya.

Standar Mutu dan Keamanan Pangan Hasil Kelautan dan Perikanan mengacu kepada:

1. Standar Nasional Indonesia (SNI)

## Laporan Kinerja Triwulan I Tahun 2025

2. Standar lainnya yang dipersyaratkan perdagangan dalam negeri atau luar negeri sesuai ketentuan yang berlaku

Output kegiatan berupa rekomendasi yang diberikan dari hasil inspeksi dalam sistem OSS maupun secara manual.

Cara pengukuran untuk pencapaian IK

$$\%X = \frac{A+B+C+D+E+F}{xn} \times 100\%$$

%X = Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan

A = Persentase Unit Usaha yang menerapkan CBIB

B = Persentase Unit menerapkan CPIB

C = Persentase Unit Usaha yang menerapkan CPPIB

D = Persentase Unit Usaha menerapkan CPOIB

E = Persentase Unit Usaha menerapkan CDOIB

F = Persentase Unit Usaha menerapkan CPIB Kapal

xn = Jumlah dari unsur pembentuk (6)\*)

Untuk organisasi Stasiun KIPM Yogyakarta selama triwulan I tahun 2025 hanya ada realisasi untuk sertifikasi Cara Penanganan Ikan Yang Baik di Atas Kapal. Untuk sertifikasi bidang primer lainnya triwulan I 2025 tidak ada permohonan. Sehingga capaian pada indikator 01 adalah sebagai berikut

- **CBIB : Cara Budidaya Ikan Yang Baik**

Target Sertifikat : 0

Realisasi Sertifikat : 0

Persentase Capaian : -

- **CPIB : Cara Pembenihan Ikan Yang Baik**

Target Sertifikat : 0

Realisasi Sertifikat : 0

Persentase Capaian : -

- **CPPIB : Cara Pembuatan Pakan Ikan Yang Baik**

Target Sertifikat : 0

Realisasi Sertifikat : 0

## Laporan Kinerja Triwulan I Tahun 2025

Persentase Capaian : -

- **CPOIB : Cara Pembuatan Obat Ikan Yang Baik**

Target Sertifikat : 0

Realisasi Sertifikat : 0

Persentase Capaian : -

- **CDOIB : Cara Distribusi Obat Ikan Yang Baik**

Target Sertifikat : 0

Realisasi Sertifikat : 0

Persentase Capaian : -

- **CPIB Kapal : Cara Penanganan Ikan Yang Baik di atas Kapal**

Target Sertifikat : 21

Realisasi Sertifikat : 21

Persentase Capaian : 100%



**Gambar 6. Kegiatan Sertikasi CPIB Kapal**

Sehingga secara total realisasi Indikator Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Stasiun KIPM Yogyakarta (%) adalah sebagai berikut

$$\%X = \frac{0+0+0+0+0+100}{1} = 100\%$$

Capaian indikator Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan triwulan I tahun 2025 ialah 100% dari target 70% sehingga pencapaian kinerja ialah 120%, hal ini sama jika dibandingkan dengan renstra 2020-2024 yang targetnya 70%. Sementara realisasi tahun sebelumnya yaitu 100%.

Sertifikat Cara Panganan Ikan Yang Baik diatas Kapal adalah sertifikat yang diberikan kepada kapal penangkap ikan dan/atau kapal pengangkut ikan yang menyatakan bahwa kapal tersebut telah memenuhi persyaratan Pengendalian Mutu pada kegiatan penangkapan ikan. Realisasi CPIB Kapal semuanya merupakan kapal pembeku yang melakukan pembongkaran di PPS Cilacap. Untuk wilayah DIY sendiri belum ada permohonan pengajuan SCPIB Kapal dengan kendala Belum adanya akses pelatihan CPIB Kapal untuk Awak Kapal untuk kapal-kapal di Wilayah Yogyakarta. Dari 21 kapal, ada 18 permohonan baru dan 3 permohonan perpanjangan. Rincian kegiatan inspeksi ialah 9 sertifikat bulan januari, 4 sertifkat bulan february dan 8 sertifkat bulan maret 2025. Seluruh kapal memperoleh sertifkat dengan grade C. Pelaksanaan inspeksi kapal pada tahun 2025 ini dominan dilakukan secara virtual. Kendala dalam proses sertifikasi CPIB Kapal ialah waktu pendaratan dan kegiatan bongkar kapal yang tidak menentu dan sering mendadak dan permohonan sering diajukan mendadak, sehingga sulit untuk merencanakan kegiatan inspeksi CPIB Kapal dan pelaksanaan inspeksi tidak bisa berjalan optimal.

Indikator kegiatan ini dapat dilaksanakan sesuai target. Keberhasilan capaian merupakan hasil koordinasi yang baik antara Pimpinan dengan pegawai dibawahnya. Kepatuhan pengguna jasa dalam melengkapi dokumen permohonan juga menjadi aspek dalam pencapaian target. Pada bulan Maret 2025 juga telah dilaksanakan kegiatan monitoring pelaksanaan SCPIB Kapal di UPT Badan Mutu Yogyakarta oleh Pusat Mutu Produksi Primer BPPMHKP

Untuk sertifikasi primer lainnya belum ada permohonan yang masuk, kendala yang dihadapi masih terbatasnya informasi bagi pelaku usaha bidang budidaya/pembenihan bagaimana tatacara pendaftaran lewat OSS dan hampir seluruh pelaku usaha belum mengetahui perpanjangan/ permohonan baru sertifikasi sudah berada kepengurusannya di BPPMHKP.

## Laporan Kinerja Triwulan I Tahun 2025



**Gambar 7. Kegiatan Monitoring penerapan Sertifikasi CPIB Kapal oleh Pusat Mutu Primer**

Tabel 4. Rekapitulasi Sertifikasi Primer Triwulan I Tahun 2025

Nama UPT : Stasiun KIPM Yogyakarta																			
BULAN	JUMLAH SERTIFIKAT SEKTOR PRODUKSI PRIMER																		Persentase (%) Primer
	CPIB Kapal			CPIB Pembenihan			CBIB Budidaya			CPPIB			CPOIB			CDOIB			
	Permohonan	Terbit Sertifikat	Persentase (%)	Permohonan	Terbit Sertifikat	Persentase	Permohonan	Terbit Sertifikat	Persentase	Permohonan	Terbit Sertifikat	Persentase	Permohonan	Terbit Sertifikat	Persentase	Permohonan	Terbit Sertifikat	Persentase	
Januari	9	9	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Februari	4	4	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Maret	8	8	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
April	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mei	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Juni	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Juli	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Agustus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
September	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Oktober	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
November	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Desember	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>21</b>	<b>21</b>	<b>100.0</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>100</b>

Tabel 5. .Rekapitulasi CPIB Kapal Tahun Triwulan I Tahun 2025

No	Nama Kapal	Nomor Sertifikat	Grade	Jenis Produk	Tanggal Terbit	Masa Berlaku
1	Hasil Melimpah Jaya 1	ID-CPIB-K-33-250034	C	Frozen Tuna, Frozen Pelagic Fish, Frozen Cephalopod	10 January 2025	10 January 2027
2	Berkat Samudra Raya	ID-CPIB-K-33-250035	C	Frozen Tuna, Frozen Pelagic Fish, Frozen Cephalopod	10 January 2025	10 January 2027
3	Hindia Jaya	ID-CPIB-K-33-250036	C	Frozen Tuna, Frozen Pelagic Fish, Frozen Cephalopod	10 January 2025	10 January 2027
4	Nelayan Berjaya	ID-CPIB-K-33-250037	C	Frozen Tuna, Frozen Pelagic Fish, Frozen Cephalopod	20 January 2025	20 January 2027
5	Anugrah Jaya Melimpah	ID-CPIB-K-33-250038	C	Frozen Tuna, Frozen Pelagic Fish, Frozen Cephalopod	20 January 2025	20 January 2027
6	Berkat Samudra Jaya	ID-CPIB-K-33-250039	C	Frozen Tuna, Frozen Pelagic Fish, Frozen Cephalopod	20 January 2025	20 January 2027
7	Hasil Melimpah 17	ID-CPIB-K-33-250040	C	Frozen Tuna, Frozen Pelagic Fish, Frozen Cephalopod	20 January 2025	20 January 2027
8	Melimpah Jaya I	ID-CPIB-K-33-250043	C	Frozen Tuna, Frozen Pelagic Fish, Frozen Cephalopod	22 January 2025	22 January 2027
9	Karya Mitra 1	ID-CPIB-K-33-250044	C	Frozen Tuna, Frozen Pelagic Fish, Frozen Cephalopod	22 January 2025	22 January 2027
10	Sumber Berkah 21	ID-CPIB-K-33-250049	C	Frozen Tuna, Frozen Pelagic Fish, Frozen Cephalopod	05 February 2025	05 February 2027
11	Baruna Jaya 07	ID-CPIB-K-33-250052	C	Frozen Tuna, Frozen Pelagic Fish, Frozen Cephalopod	13 February 2025	13 February 2027
12	Makmur Jaya Bahari VII	ID-CPIB-K-33-250060	C	Frozen Tuna, Frozen Pelagic Fish, Frozen Cephalopod	19 February 2025	19 February 2027
13	Nusantara Bahari 1	ID-CPIB-K-33-250063	C	Frozen Tuna, Frozen Cephalopod	19 February 2025	19 February 2027
14	Baruna Jaya 06	ID-CPIB-K-33-250071	C	Frozen Tuna, Frozen Pelagic Fish, Frozen Cephalopod	04 March 2025	04 March 2027
15	Berkat Melimpah 10	ID-CPIB-K-33-250074	C	Frozen Tuna, Frozen Pelagic Fish, Frozen Cephalopod	06 March 2025	06 March 2027
16	Bangkit Harapan Jaya 0	ID-CPIB-K-33-250096	C	Frozen Tuna, Frozen Pelagic Fish, Frozen Cephalopod	26 March 2025	26 March 2027
17	Bangkit Harapan Jaya 0	ID-CPIB-K-33-250097	C	Frozen Tuna, Frozen Pelagic Fish, Frozen Cephalopod	26 March 2025	26 March 2027
18	Uli Jaya	ID-CPIB-K-33-250091	C	Frozen Tuna, Frozen Pelagic Fish, Frozen Cephalopod	26 March 2025	26 March 2027
19	Berkat Usaha	ID-CPIB-K-33-250090	C	Frozen Tuna, Frozen Pelagic Fish, Frozen Cephalopod	26 March 2025	26 March 2027
20	Makmur Jaya Bahari XII	ID-CPIB-K-33-250093	C	Frozen Tuna, Frozen Pelagic Fish, Frozen Cephalopod	27 March 2025	27 March 2027
21	Cahaya Mutiara Laut	ID-CPIB-K-33-250092	C	Frozen Tuna, Frozen Pelagic Fish, Frozen Cephalopod	27 March 2025	27 March 2027

## IK2 Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Stasiun KIPM Yogyakarta (%)

Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Pasca Panen yang memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan adalah ukuran dalam menilai seberapa besar volume atau jumlah produk hasil kelautan dan perikanan sektor Produksi Pasca Panen meliputi: PMMT/HACCP dan Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) yang telah sesuai dengan standar, kriteria keamanan pangan yang ditetapkan oleh Otoritas Kompeten.

Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan adalah upaya pencegahan dan pengendalian yang harus diperhatikan dan dilakukan sejak pra produksi sampai dengan pemasaran untuk menghasilkan hasil kelautan dan perikanan yang bermutu dan aman bagi kesehatan manusia. Standar Mutu dan Keamanan Pangan Hasil Kelautan dan Perikanan dicapai melalui penerapan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan.

Sektor produksi Pasca Panen merujuk kepada rangkaian kegiatan yang dilakukan setelah ikan atau hasil perikanan ditangkap dengan tujuan untuk meningkatkan nilai, menjaga kualitas, memperpanjang umur simpan produk perikanan yang meliputi Penanganan, Pengolahan, Distribusi, hingga pemasaran produk perikanan.

Standar Mutu dan Keamanan Pangan Hasil Kelautan dan Perikanan mengacu kepada:

1. Standar Nasional Indonesia (SNI);
2. Standar Internasional (Codex Alimentarius);
3. Standar lainnya yang dipersyaratkan perdagangan dalam negeri atau luar negeri sesuai ketentuan yang berlaku.

Sertifikat Penerapan PMMT/HACCP dan SKP yang diterbitkan berdasarkan ruang lingkup produk, jenis olahan ikan, unit proses, dan/atau potensi bahaya (hazard) yang berbeda yang ditangani dan/atau diolah.

Cara Pengukuran IK 02 ini adalah

$$\%X = \frac{A+B}{xn} \times 100\%$$

- %X = Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan

## Laporan Kinerja Triwulan I Tahun 2025

- A = Presentase Penerbitan Sertifikat Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) ruang lingkup produk
- B = Persentase SKP yang diterbitkan di Unit Pengolahan Ikan skala UMKM dan menengah besar yang menerapkan GMPSSOP
- xn = Jumlah dari unsur pembentuk

Untuk organisasi Stasiun KIPM Yogyakarta selama triwulan I tahun 2025 terdapat realisasi untuk sertifikasi HACPP dan SKP. Sehingga capaian pada indikator 02 adalah sebagai berikut :

- **HACCP**  
Permohonan Sertifikat : 2  
Realisasi Sertifikat : 2  
Persentase Capaian : 100
- **SKP**  
Permohonan Sertifikat : 25  
Realisasi Sertifikat : 23  
Persentase Capaian : 92

Sehingga secara total realisasi Indikator Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Stasiun KIPM Yogyakarta (%) adalah sebagai berikut

$$\%X = \frac{100+92}{2} = 96,00\%$$

Capaian indikator Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan triwulan I tahun 2025 ialah 96% dari target 70% sehingga pencapaian kinerja ialah 120%, hal ini sama jika dibandingkan dengan renstra 2020-2024 yang targetnya 70%. Sementara realisasi tahun sebelumnya yaitu 86,36%.

Sertifikasi HACCP selama triwulan I tahun 2025 dilakukan untuk permohonan baru ruang lingkup keong laut beku pada salah satu UPI di Cilacap dan Tuna Kaleng pada UPI yang berlokasi di Yogyakarta, Kedua sertifikasi ini dilakukan pada bulan Februari 2025 dan mendapatkan grade B. Untuk SKP realisasi sertifikat dilakukan 3 sertifikat bulan Februari dan 20 Sertifikat pada bulan Maret 2025. Lokasi sertifikasi UPI untuk 4 produk di DI Yogyakarta dan 19 produk di Jawa Tengah. Dari 23 sertifikat, 3 sertifikat merupakan permohonan perpanjangan dan sisanya yaitu 20 sertifikat merupakan permohonan baru



## Laporan Kinerja Triwulan I Tahun 2025

Sertifikat Kelayakan Pengolahan adalah sertifikat yang diberikan kepada pelaku usaha terhadap setiap unit penanganan dan/atau pengolahan ikan yang telah menerapkan cara penanganan dan/atau pengolahan ikan yang baik dan memenuhi persyaratan prosedur operasi standar sanitasi. Beberapa UPI tidak terbit SKP dikarenakan tidak melakukan tindakan perbaikan kembali atas catatan yang diberikan verifikator.

Tabel 6 . Realisasi SKP Triwulan I Tahun 2025

REALISASI PENERBITAN SERTIFIKAT KELAYAKAN PENGOLAHAN TAHUN 2025									
NO	NAMA UPI	JENIS PERMOHONAN	NOMOR SKP	TGL TERBIT	TGL KADALUARSA	NAMA PRODUK	ENIS OLAHAN	NAMA PROVINSI	NAMA KAB/KOTA
1	PT. BERKAH MUTIARA SELATAN	baru	36333/33/SKP/BK/III/2025	3/24/2025	3/24/2027	Kerang Rebus Beku	Beku	Jawa Tengah	Kabupaten Cilacap
2	PT. BERKAH MUTIARA SELATAN	baru	36332/33/SKP/BK/III/2025	3/24/2025	3/24/2027	Keong Rebus Beku	Beku	Jawa Tengah	Kabupaten Cilacap
3	PT. BERKAH MUTIARA SELATAN	baru	36334/33/SKP/KR/III/2025	3/24/2025	3/24/2027	Cephalopoda Kering (Soto)	Kering	Jawa Tengah	Kabupaten Cilacap
4	PT. BERKAH MUTIARA SELATAN	baru	36338/33/SKP/BK/III/2025	3/24/2025	3/24/2027	Ikan Pelagis Beku (Teri, B)	Beku	Jawa Tengah	Kabupaten Cilacap
5	PT. BERKAH MUTIARA SELATAN	baru	36337/33/SKP/BK/III/2025	3/24/2025	3/24/2027	Ikan Demersal Beku (Swa)	Beku	Jawa Tengah	Kabupaten Cilacap
6	PT. BERKAH MUTIARA SELATAN	baru	36339/33/SKP/BK/III/2025	3/24/2025	3/24/2027	Cephalopoda Beku (Soto)	Beku	Jawa Tengah	Kabupaten Cilacap
7	PT. BERKAH MUTIARA SELATAN	baru	36340/33/SKP/BK/III/2025	3/24/2025	3/24/2027	Udang Beku	Beku	Jawa Tengah	Kabupaten Cilacap
8	PT. BERKAH MUTIARA SELATAN	baru	36341/33/SKP/BK/III/2025	3/24/2025	3/24/2027	Lobster Beku	Beku	Jawa Tengah	Kabupaten Cilacap
9	PT. BERKAH MUTIARA SELATAN	baru	36342/33/SKP/BK/III/2025	3/24/2025	3/24/2027	Kerang Rebus Beku	Beku	Jawa Tengah	Kabupaten Cilacap
10	PT. BERKAH MUTIARA SELATAN	baru	36343/33/SKP/KR/III/2025	3/24/2025	3/24/2027	Cephalopoda Kering (Soto)	Kering	Jawa Tengah	Kabupaten Cilacap
11	PT. BERKAH MUTIARA SELATAN	baru	36335/33/SKP/BK/III/2025	3/24/2025	3/24/2027	Kerang Beku	Beku	Jawa Tengah	Kabupaten Cilacap
12	PT. BERKAH MUTIARA SELATAN	baru	36336/33/SKP/BK/III/2025	3/24/2025	3/24/2027	Keong Beku	Beku	Jawa Tengah	Kabupaten Cilacap
13	PT. BERKAH MUTIARA SELATAN	baru	36344/33/SKP/BK/III/2025	3/24/2025	3/24/2027	Kerang Beku	Beku	Jawa Tengah	Kabupaten Cilacap
14	PT. BERKAH MUTIARA SELATAN	baru	36345/33/SKP/BK/III/2025	3/24/2025	3/24/2027	Keong Beku	Beku	Jawa Tengah	Kabupaten Cilacap
15	PT. BERKAH MUTIARA SELATAN	baru	36346/33/SKP/BK/III/2025	3/24/2025	3/24/2027	Keong Rebus Beku	Beku	Jawa Tengah	Kabupaten Cilacap
16	PT. BERKAH MUTIARA SELATAN	baru	36330/33/SKP/BK/III/2025	3/24/2025	3/24/2027	Lobster Beku	Beku	Jawa Tengah	Kabupaten Cilacap
17	PT. BERKAH MUTIARA SELATAN	baru	36331/33/SKP/BK/III/2025	3/24/2025	3/24/2027	Udang Beku	Beku	Jawa Tengah	Kabupaten Cilacap
18	PT. SINAR MAKMUR SEMARANG	perpanjangan	36235/33/SKP/LN/III/2025	3/19/2025	3/19/2027	Osein	-	Jawa Tengah	Kabupaten Magelang
19	POKLAHSAR RUMAH BELAJAR USAHA	baru	36221/34/SKP/LN/III/2025	3/18/2025	3/18/2027	Keripik Ikan & Keripik Ru	Lainnya	Daerah Istimewa Yogyakarta	Kabupaten Gunung Kidul
20	LAGUNA INDAH	baru	35954/34/SKP/KR/III/2025	3/6/2025	3/6/2027	Krispi Ikan	Kering	Daerah Istimewa Yogyakarta	Kabupaten Kulon Progo
21	MINA ABADHI FARM	perpanjangan	35418/34/SKP/KR/II/2025	2/4/2025	2/4/2027	Krispi Ikan	Kering	Daerah Istimewa Yogyakarta	Kabupaten Bantul
22	MINA ABADHI FARM	perpanjangan	35417/34/SKP/LN/II/2025	2/4/2025	2/4/2027	Abon Ikan	Lainnya	Daerah Istimewa Yogyakarta	Kabupaten Bantul
23	PT. TARZAN SEAFOOD INTERNASIONAL	baru	35407/33/SKP/BK/II/2025	2/4/2025	2/4/2027	Keong Laut Beku	Beku	Jawa Tengah	Kabupaten Cilacap

Tabel 7 . Realisasi HACCP Triwulan I Tahun 2025

No	Nama	Provinsi	Produk	Grade		No.Sertifikat HACCP	Tgl.Terbit	Berlaku Sampai	Keterangan
1	PT. Tarzan Seafood Internasional	Jawa Tengah	Frozen Sea Snail	B	1	216/PM/HA CCP/PB/02/25	19 Februari 2025	19 Februari 2027	INSPEKSI HACCP 17 FEBRUARI 2025
2	CV Buana Citra Sentosa	Yogyakarta	Canned Tuna	B	2	236/PM/HA CCP/PL/02/25	21 Februari 2025	21 Februari 2027	INSPEKSI HACCP 18 FEBRUARI 2025



Sertifikat Penerapan Program Manajemen Mutu Terpadu/Hazard Analysis and Critical Control Point yang selanjutnya disebut Sertifikat Penerapan PMMT/HACCP adalah sertifikat yang diberikan kepada pelaku usaha industri pengolahan ikan yang telah memenuhi dan menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan pada setiap Unit Pengolahan Ikan. Untuk realisasi pelaksanaan HACCP terdiri dari terbitnya sertifikat baru sebanyak 2 produk, realisasi sertifikat HACCP realisasi 100%.

Indikator kegiatan ini dapat dilaksanakan sesuai target. Keberhasilan capaian merupakan hasil koordinasi yang baik antara Pimpinan dengan pegawai dibawahnya. Kepatuhan pengguna jasa dalam melengkapi dokumen permohonan juga menjadi aspek dalam pencapaian target. Ada beberapa catatan terkait SKP yang tidak terbit dikarenakan tidak dilakukan tindakan perbaikan oleh UPI sehingga tidak direkomendasikan untuk diterbitkan sertifikat SKP

### **IK3 Lokasi Pengawasan Mutu Hasil Perikanan sektor produksi pasca panen lingkup UPT Stasiun KIPM Yogyakarta (lokasi)**

Pengawasan mutu adalah semua kegiatan yang meliputi bimbingan fasilitasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap mutu dan keamanan hasil perikanan

Persentase pengawasan mutu hasil perikanan di wilayah RI merupakan nilai Pengawasan Mutu hasil KP di wilayah RI yang meliputi pengawasan implementasi dari terbitnya Inpres 01 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat dan melalui monitoring terhadap cemaran *marine biotoxin* dan/atau cemaran kimia berbahaya yang berdampak pada mutu hasil KP.

Lokasi dari kegiatan Pengawasan ini dilakukan di Kab/Kota yang konsumsi ikannya tinggi dengan lokus adalah Pasar moderen, Pasar Tradisional, Supplier, TPI/PPI yang produk ikannya dikonsumsi oleh masyarakat lokal/domestic. Melalui pengawasan penilaian sarana prasarana dan pengujian sampel produk perikanan dengan parameter uji Organoleptik, mikrobiologi, kimia dan bahan berbahaya (formalin) dan parameter uji lain yang diperlukan dan Lokasi wilayah Perairan/Pelabuhan Perikanan di wilayah Republik Indonesia yang dilakukan monitoring terhadap ikan dan/atau hasil perikanan yang menjadi sumber bahan baku Industri maupun konsumsi domestic yang bebas dari cemaran *marine biotoxin* dan cemaran kimia berbahaya.



**Gambar 9. Kegiatan Pengawasan Mutu Hasil Perikanan Domestik**

Stasiun KIPM Yogyakarta melakukan pengawasan mutu hasil perikanan domestik pada pasar-pasar tradisional, pasar modern, Pelabuhan perikanan dan supplier. Namun untuk tahun 2025 hanya ada target ada 2 lokasi yaitu Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta. Dari target 2 Lokasi terealisasi 2 lokasi sehingga tercapai 100%. Namun dalam kinerja realisasi 1 lokasi karena pelaksanaan 2 kali semester 1 dan semester 2. Pengukuran indikator kinerja ini adalah sebagai berikut :

- **Pengawasan Mutu Hasil Perikanan Domestik**

Target Pengawasan : 2 lokasi

Realisasi Pengawasan : 2 lokasi

Persentase Capaian : 100 %

Sehingga secara rinci realisasi Indikator Persentase pengawasan mutu hasil perikanan di wilayah RI lingkup UPT Stasiun KIPM Yogyakarta (%) adalah sebagai berikut

**Realisasi Pengawasan Mutu Hasil Perikanan Domestik Triwulan I 2025**

## Laporan Kinerja Triwulan I Tahun 2025

No	Kabupaten (LOKASI)	Titik Pengambilan Sampel (LOKUS)	Tanggal Pengambilan Sampel (Sem I)	Tanggal Pengambilan Sampel (Sem II)	Ket
1	Sleman	Pasar Stan	13 Maret 2025		Realisasi Lokasi Triwulan I : 2 Lokasi Triwulan II : - Lokasi sd Triwulan II : - Lokasi
		Pasar Condong Catur			
2	Kota Yogyakarta	Pasar Sentul	11 Maret 2025		Triwulan III : - Lokasi sd Triwulan III : - Lokasi Triwulan IV : - Lokasi sd Triwulan IV : - Lokasi
		Pasar Beringharjo			
		Superindo Parangtritis			

Indikator kegiatan ini dapat dilaksanakan sesuai target. Keberhasilan capaian merupakan hasil koordinasi yang baik antara Pimpinan dengan pegawai dibawahnya. Koordinasi yang baik pada indikator kegiatan ini ialah antara BPPMHKP Yogyakarta dengan Instnasi Daerah dikarenakan kegiatan ini merupakan kegiatan lintas sektoral yang melibatkan berbagai stakeholder. Kendala yang dihadapi adalah tindaklanjut dari temuan yang ada tidak semua dapat dilakukan perbaikan karena keterbatasan anggaran dari instansi pembina. Kegiatan ini juga dilakukan untuk memantau harga ikan dan stok ikan menjelang 1446 H. Dari hasil pemantauan untuk stok ikan mencukupi dan harga relatif stabil.

Capaian indikator Lokasi Pengawasan Mutu Hasil Perikanan sektor produksi pasca panen lingkup UPT Stasiun KIPM Yogyakarta triwulan I tahun 2025 ialah 2 lokasi dari target 2 lokasi sehingga pencapaian kinerja ialah 100%, hal ini sama jika dibandingkan dengan renstra 2020-2024 yang targetnya 2. Namun dalam kinerja realisasi 1 lokasi karena pelaksanaan 2 kali semester 1 dan semester 2. Sementara realisasi tahun sebelumnya yaitu 6 lokasi

### IK 4.Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor lingkup UPT Stasiun KIPM Yogyakarta (%)

Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor merujuk pada perbandingan antara jumlah ikan dan hasil perikanan yang disertifikasi (jumlah HC yang terbit) dan volume yang diekspor ke pasar internasional dan penolakan terhadap produk ikan dan hasil perikanan oleh negara tujuan ekspor (SMKHP yang ditolak oleh negara tujuan ekspor).

Pengiriman ikan dan hasil perikanan yang diekspor telah memenuhi persyaratan mutu dan keamanan hasil perikanan serta tidak dilakukan penolakan oleh negara tujuan ekspor. Rasio ini penting untuk memahami bagaimana sektor perikanan memberikan kontribusi terhadap perekonomian khususnya perdagangan internasional.

Sertifikat Kesehatan (Health Certificate) adalah sertifikat yang menyatakan bahwa ikan dan hasil perikanan telah memenuhi persyaratan mutu dan keamanan untuk konsumsi manusia dan Bukti pengiriman hasil perikanan yang telah memenuhi persyaratan adalah

diterimanya Sertifikat Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan. Saat ini nomenklatur HC telah menjadi SMKHP. Sertifikat Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SMKHP) atau disebut juga Health Certificate (HC) merupakan bukti bahwa hasil perikanan yang dipasarkan telah diproses berdasarkan penerapan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan yang diterbitkan apabila suatu produk/hasil perikanan telah memenuhi persyaratan atau standar yang berlaku sehingga aman untuk dikonsumsi manusia. Dengan berkembangnya sistem manajemen mutu, maka penerbitan SMKHP didasarkan pada hasil pengawasan mutu terhadap efektifitas penerapan persyaratan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan pada Unit Usaha Pembenihan, Pembesaran dan Unit Pengolahan Ikan serta hasil pengujian contoh.

Cara pengukuran indikator ini ialah :

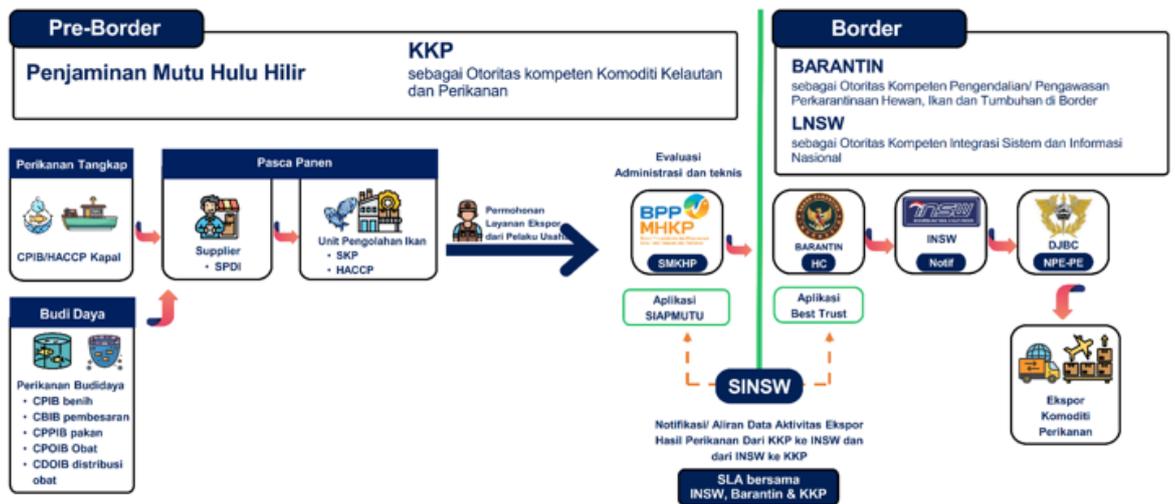
$$x = \frac{A - B}{A}$$

$x$  = Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor (%)

A = SMKHP yang diterbitkan oleh BPPMHKP

B = Jumlah SMKHP yang ditolak oleh negara tujuan

### Proses Bisnis Kegiatan Ekspor Hasil Kelautan Perikanan



Gambar 10. Proses Bisnis Kegiatan Ekspor Hasil Kelautan dan Perikanan

## Laporan Kinerja Triwulan I Tahun 2025

Kontribusi BPPMHKP dalam meningkatkan kinerja ekspor produk hasil perikanan di pasar internasional adalah dengan memenuhi rasio ikan dan hasil perikanan memenuhi syarat ekspor. Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan memenuhi persyaratan mutu dan kesehatan ikan dibuktikan dengan diterimanya atau tidaknya penolakan sertifikat mutu ikan (HC mutu) UPT Stasiun KIPM Yogyakarta di negara tujuan ekspor untuk menjamin produk bermutu dan aman dikonsumsi dan dibuktikan dengan ada atau tidaknya penolakan oleh negara tujuan ekspor berdasarkan notifikasi penolakan yang diterima dari otoritas kompeten negara tersebut. Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor dihitung dengan membandingkan realisasi jumlah sertifikat yang diterbitkan dengan sertifikat yang memenuhi persyaratan jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan (produk diterima) dikalikan 100%, seperti yang tertera pada tabel berikut

## Laporan Kinerja Triwulan I Tahun 2025

Nama UPT : Stasiun KIPM Yogyakarta

BULAN					JUMLAH PENOLAKAN	% Rasio Ekspor Ikan dan Hasil Perikanan
	Mutu E (Jepang)	Mutu B (China)	Mutu D (Vietnam)	Mutu A (Korsel)		
Januari	1	3	0	0	0	100
Februari	2	1	0	0	0	100
Maret	3	15	0	1	0	100
April	0	0	0	0	0	100
Mei	0	0	0	0	0	100
Juni	0	0	0	0	0	100
Juli	0	0	0	0	0	100
Agustus	0	0	0	0	0	100
September	0	0	0	0	0	100
Oktober	0	0	0	0	0	100
November	0	0	0	0	0	100
Desember	0	0	0	0	0	100
<b>TOTAL</b>	<b>6</b>	<b>19</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>100</b>

Sampai dengan Triwulan I Tahun 2025, SMKHP yang memenuhi syarat sejumlah 26 sertifikat tanpa ada kasus penolakan ekspor. Dengan demikian rasio ekspor ikan yang diterima di negara tujuan pada Triwulan ini mencapai 100% dari target 99% sehingga secara persentase kinerja tercapai 101,1%

Sehingga secara total realisasi Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor lingkup UPT Stasiun KIPM Yogyakarta (%) adalah sebagai berikut

$$\%x = \frac{26 - 0}{26} = 100\%$$

Negara tujuan ekspor utama melalui Stasiun KIPM Yogyakarta adalah Jepang dengan komoditas udang diikuti dengan negara China dengan komoditas layur beku. Komoditas lain yang diekspor ialah keong laut beku dan cumi cumi beku. Keberhasilan ini didukung oleh kinerja penjaminan mutu dan keamanan hasil perikanan yang telah dilakukan Stasiun KIPM Yogyakarta, melalui surveilan konsistensi penerapan HACCP melalui in-process inspection di Unit Pengolahan Ikan. Di samping itu, keberhasilan ini juga didukung oleh kinerja laboratorium BPPMHKP dalam melakukan pengujian virus, kimia, mikrobiologi dan organoleptik dan peningkatan kompetensi inspektur mutu yang ada di UPT Stasiun KIPM Yogyakarta.

## Laporan Kinerja Triwulan I Tahun 2025

Keberhasilan kegiatan ini merupakan bentuk kepatuhan dari pengguna jasa dalam memenuhi persyaratan ekspor. Petugas Inspektur mutu juga secara konsisten melakukan surveilen ke UPI untuk memastikan penerapapan SJMHKP terus dilakukan. Beberapa kendala dalam pelaksanaan ekspor ialah transisi dari BKIPM dan BPPMHKP sehingga pelaku usaha belum tersosialisasi sepenuhnya untuk pengurusan menggunakan aplikasi yang baru.



Gambar 10. Kegiatan Ekspor Triwulan I Melalui Stasiun KIPM Yogyakarta

### Sasaran kegiatan 2.

**Terselenggaranya Pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang konsisten sesuai standar**

Pada sasaran kegiatan 2 ini didukung oleh 2 indikator kinerja yaitu a. Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu laboratorium lingkup UPT Stasiun KIPM Yogyakarta dan b. Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu lembaga inspeksi lingkup UPT Stasiun KIPM Yogyakarta. Namun pada triwulan I belum ada target terlaksananya kegiatan tersebut.

### Sasaran kegiatan 3.

**Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan**

### Stasiun KIPM Yogyakarta

## Laporan Kinerja Triwulan I Tahun 2025

Pada sasaran kegiatan 3 terdapat 3 indikator kegiatan yang mendukung untuk triwulan I tahun 2025 yaitu Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup UPT Stasiun KIPM Yogyakarta, Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP lingkup UPT Stasiun KIPM Yogyakarta dan Survey Kepuasan Masyarakat lingkup UPT Stasiun KIPM Yogyakarta

### IK13. Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup UPT Stasiun KIPM Yogyakarta

Definisi IKU ini adalah persentase rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal berdasarkan LHP (terbatas pada LHP Audit, Reviu dan Evaluasi baik bentuk surat maupun Bab) yang telah ditindaklanjuti (berstatus tuntas) sampai dengan waktu pengukuran.

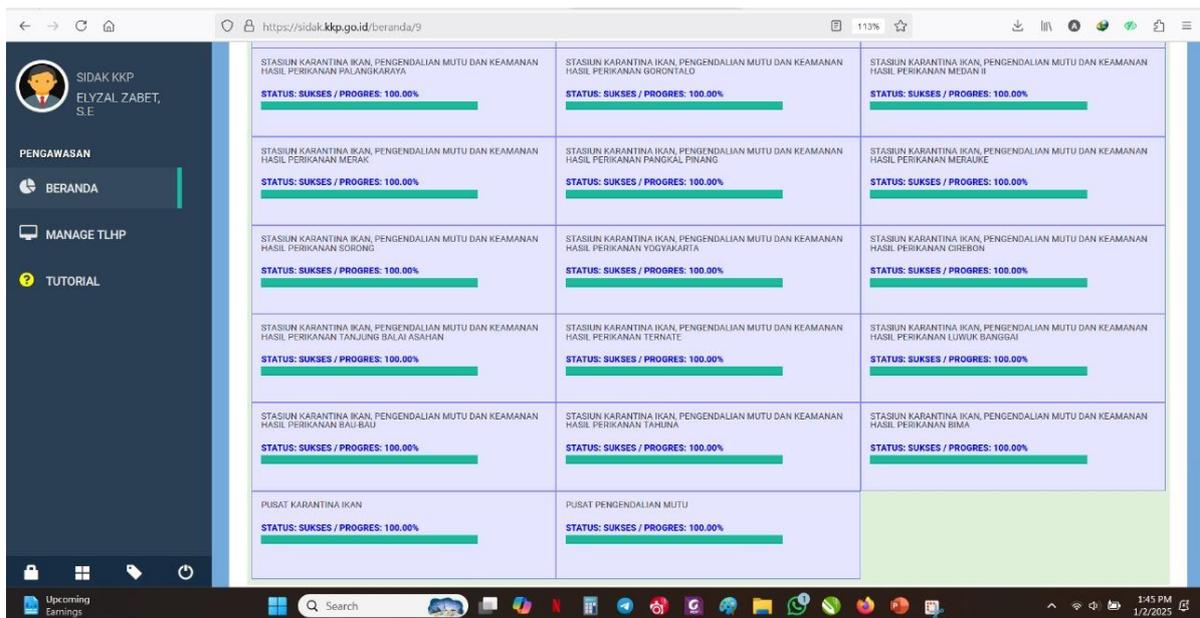
Realisasi indikator ini pada triwulan I tahun 2025 adalah 100% dari target 85% atau tercapai 117,65% sebagaimana tampilan pada dashboard Aplikasi Sidak KKP sesuai Gambar 6 berikut. Sedangkan realisasi pada triwulan I tahun 2024 adalah 100% dari target 80% atau tercapai 120%

$$\text{Rumus perhitungan} = \frac{\sum Nt}{\sum N} \times 100\%$$

Keterangan :

$\sum Nt$  : Jumlah rekomendasi LHP Inspektorat Jenderal KKP yang telah ditindaklanjuti

$\sum N$  : Jumlah rekomendasi LHP Inspektorat Jenderal KKP



Gambar 16. Tangkapan Layar SIDAK 2025

## Laporan Kinerja Triwulan I Tahun 2025

$\Sigma N_t$  : Jumlah rekomendasi LHP Inspektorat Jenderal KKP yang telah ditindaklanjuti = 0

$\Sigma N$  : Jumlah rekomendasi LHP Inspektorat Jenderal KKP = 0

$$\% \text{ rekomendasi} = \frac{0}{0} \times 100\% = 100\%$$

Nilai Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup UPT Lingkup BPPMHKP melalui aplikasi SIDAK. Keberhasilan kegiatan ini ialah Pimpinan satuan kerja yang diperiksa wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam LHP Inspektorat jenderal dengan memberikan jawaban atau penjelasan, serta melampirkan dokumen pendukung.

### **IKS.14. Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang Diumumkan pada SiRUP Lingkup UPT Stasiun KIPM Yogyakarta**

Rencana Umum Pengadaan (RUP) adalah instrumen penting dalam meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan pemerintah yang dilaksanakan melalui proses pengadaan barang/jasa. Melalui RUP, pemerintah mengumumkan secara terbuka pemaketan pengadaan yang akan dilaksanakan oleh KKP. Pengukuran terhadap persentase RUP yang diumumkan pada SiRUP dapat merepresentasikan kualitas perencanaan PBJ di KKP. Nilai pada indikator ini didapatkan dari persentase nilai pengadaan barang/jasa yang diumumkan dalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) dibandingkan dengan nilai pagu pengadaan suatu unit kerja mandiri (Satuan Kerja). Pagu pengadaan merupakan pagu program dikurangi belanja pegawai dan pagu non pengadaan. Adapun ketentuan mengenai Persentase Rencana Umum Pengadaan dijabarkan pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Pasal 11 Ayat (1). Penarikan data dilaksanakan setiap tanggal 1 pada Triwulan berikutnya.

Formula Perhitungan:

Persentase RUP PBJ yang diumumkan di SIRUP =

$$\frac{\text{Nilai rencana umum PBJ yang diumumkan pada SIRUP}}{\text{Pagu Pengadaan Barang dan Jasa}} \times 100\%$$

Jika RUP yang diumumkan unit kerja melebihi pagu pengadaan sehingga persentase akan bernilai lebih dari 100%, maka selisih persentase RUP yang diumumkan tersebut akan menjadi pengurang terhadap angka capaian indikator ini. Pengukuran indikator dilakukan secara triwulanan dengan target 76% dan realisasi sebesar 100 % atau tercapai 120%.

$$\% RUP PBJ \text{ pada SIRUP} = \frac{810,283,000}{810,283,000} \times 100\% = 100\%$$

### **IKS.15. Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan UPT Stasiun KIPM Yogyakarta**

Salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS), perlu disusun Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) sebagai tolok ukur untuk menilai tingkat kualitas pelayanan dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik menegaskan bahwa penyelenggara berkewajiban melakukan penilaian kinerja penyelenggaraan pelayanan publik secara berkala.

Selain itu, data SKM akan dapat menjadi bahan penilaian terhadap unsur pelayanan yang masih perlu perbaikan dan menjadi pendorong setiap unit penyelenggara pelayanan untuk meningkatkan kualitas pelayanannya.

Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya. SKM bertujuan untuk mengetahui tingkat kinerja unit pelayanan secara berkala sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas publik selanjutnya.

Dalam rangka mengevaluasi kinerja pelayanan publik, Pemerintah telah mengeluarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor Kep/14/M.PAN/2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Oleh karena itu, Stasiun KIPM Yogyakarta telah melakukan Pengukuran Survei Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pada triwulan I tahun 2025. Pelaksanaan kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat pada triwulan I tahun 2025 dilakukan pada awal bulan Januari s/d akhir bulan Maret 2025 yang diisi oleh responden yang telah menerima pelayanan dari Stasiun KIPM Yogyakarta minimal 3 bulan terakhir dengan mengisi kuesioner secara online pada link :<https://ptsp.kkp.go.id/skm/>, kemudian dari data aplikasi SUSAN (Survei Kepuasan) tersebut diolah untuk menjadi sebuah bentuk Laporan Survei Kepuasan Masyarakat.

Link dibagikan kepada pengguna jasa baik dengan mengirimkan link melalui WhatsApp dalam bentuk QRcode atau link website <https://ptsp.kkp.go.id/skm/> ataupun

## Laporan Kinerja Triwulan I Tahun 2025

dengan menunjukkan printout Qrcode yang tersedia di meja pelayanan jika pengguna jasa langsung datang ke kantor pelayanan Stasiun KIPM Yogyakarta. Berdasarkan hasil rekapitulasi data yang telah diisi secara online melalui aplikasi Susan (Survei Kepuasan) oleh responden pada triwulan I tahun 2025 didapatkan sebanyak 18 (delapan belas) responden yang telah mengisi data dengan baik dan data ini kemudian diolah serta dianalisis lebih lanjut. Realisasi Nilai survei kepuasan masyarakat layanan publik di UPT Stasiun KIPM Yogyakarta pada triwulan I tahun 2025 adalah 95,83 dari target 88 atau tercapai 108,90%. Berdasarkan pengukuran terhadap kualitas 9 unsur pelayanan, secara umum kualitas pelayanan pada Unit Pelayanan Teknis Stasiun KIPM Yogyakarta dipersepsikan Sangat Baik oleh masyarakat penggunaannya. Hal ini terlihat dari nilai persepsi sebesar 95,95 (Gambar 4) berada dalam interval indeks persepsi antara 3,1 – 4,0 dengan nilai konversi interval indeks persepsinya berada antara 88,31 – 100,00



**Gambar 12. Nilai SKM Triwulan I Tahun 2025 Stasiun KIPM Yogyakarta**

Pencapaian indikator ini merupakan hasil penilaian dari pengguna jasa terhadap pelayanan yang diberikan oleh BPPMHKP Yogyakarta. Pelayanan yang diberikan memenuhi atau bahkan melebihi ekspektasi yang diharapkan oleh pengguna jasa

### 3.3. Realisasi Anggaran

#### 3.3.1. Realisasi Anggaran

Sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2018 tentang Efisiensi Belanja Barang Kementerian/Lembaga Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), seluruh Kementerian/lembagadiminta untuk melakukan penghematan penggunaan anggaran. Stasiun KIPM Yogyakarta juga berusaha semaksimal mungkin untuk melakukan efisisensi anggaran dengan memaksimalkan realisasi anggaran.

Alokasi anggaran perubahan Stasiun KIPM Yogyakarta pada tahun anggaran (T.A) 2025 adalah Rp 4.877.213.000. Realisasi penyerapan anggaran Stasiun KIPM Yogyakarta pada triwulan I tahun 2025 mencapai Rp 892.764.035 atau sebesar 18,30%. Rekapitulasi penyerapan anggaran Stasiun KIPM Yogyakarta triwulan I tahun 2025 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.9 Penyerapan Anggaran Stasiun KIPM Yogyakarta sd Triwulan I Tahun 2025

Bulan : 01 s.d. 03

NO	Kode   Nama Kegiatan	Keterangan	Jenis Belanja									Total	
			Pegawai	Barang	Modal	Beban Bunga	Subsidi	Hibah	BanSos	LainLain	Transfer		
1	3987   Dukungan Manajemen Internal Lingkup Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan	PAGU REALISASI	2,753,413,000 599,206,935 (21.76%)	1,708,800,000 273,147,400 (15.98%)	0	0	0	0	0	0	0	0	4,462,213,000 872,354,335 (19.55%)
		SISA	2,154,206,065	1,435,652,600	0	0	0	0	0	0	0	0	3,589,858,665
2	3989   Pengendalian Mutu	PAGU REALISASI	0 0.00%	250,000,000 16,195,200 (6.48%)	0	0	0	0	0	0	0	0	250,000,000 16,195,200 (6.48%)
		SISA	0	233,804,800	0	0	0	0	0	0	0	0	233,804,800
3	7010   Manajemen Mutu	PAGU REALISASI	0 0.00%	165,000,000 4,214,500 (2.55%)	0	0	0	0	0	0	0	0	165,000,000 4,214,500 (2.55%)
		SISA	0	160,785,500	0	0	0	0	0	0	0	0	160,785,500
<b>GRAND TOTAL</b>		<b>PAGU REALISASI</b>	<b>2,753,413,000 599,206,935 (21.76%)</b>	<b>2,123,800,000 293,557,100 (13.82%)</b>	<b>0 (0.00%)</b>	<b>4,877,213,000 892,764,035 (18.30%)</b>							
		<b>SISA</b>	<b>2,154,206,065</b>	<b>1,830,242,900</b>	<b>0</b>	<b>3,984,448,965</b>							

#### 3.3.2 Penjelasan atas realisasi anggaran

Matrix Pendanaan di Stasiun KIPM Yogyakarta terdiri dari 3 (tiga) kegiatan yaitu Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BKIPM, Pengendalian Mutu dan Manajemen mutu. Tiap-tiap kegiatan didukung anggaran yang digunakan untuk mencapai output yaitu :

1. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BKIPM
  - a. Realisasi pembayaran Gaji dan Tunjangan

- b. Operasional Kantor dan Pemeliharaan
- c. Layanan Sarana Internal
- d. Layanan Manajemen SDM
- e. Layanan Perencanaan dan Penganggaran
- f. Layanan Pemantauan dan Evaluasi
- g. Layanan Manajemen Keuangan
- h. Layanan Penyelenggaraan Kearsipan

**2. Pengendalian Mutu**

- a. Lembaga kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang divalidasi
- b. Supplier yang menerapkan Cara Penanganan Ikan Yang Baik (CPIB)
- c. Sertifikat Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) ruang lingkup produk pada UPI
- d. Produk kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang divalidasi
- e. Unit Penanganan dan/atau Pengolahan Ikan yang menerapkan sistem traceability
- f. UPI yang konsisten menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan
- g. Hasil Perikanan di wilayah RI yang diawasi mutunya
- h. Rekomendasi Kebijakan Harmonisasi Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan
- i. Produk perikanan yang diawasi dan diselesaikan kasus mutu ekspor impor-nya

**3. Manajemen Mutu**

- a. Bimbingan Teknis Peningkatan sistem jaminan mutu hasil kelautan dan perikanan
- b. Rekomendasi Kebijakan Parameter uji yang terakreditasi di laboratorium acuan dan penguji sektor kelautan perikanan
- c. Unit kerja yang menerapkan sistem manajemen mutu laboratorium
- d. Unit/Usaha perikanan yang menerapkan quality assurance sesuai standar, sistem dan regulasi

**3.3.3. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

Untuk mencapai tujuan lalu lintas hasil perikanan yang memenuhi sistem jaminan kesehatan serta jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan maka diperlukan Sumber Daya yang memadai, berupa :

- Sumber Daya Manusia yang kompeten

## Laporan Kinerja Triwulan I Tahun 2025

- Sumber Dana yang mencukupi
- Sarana dan Prasarana yang memadai

Kondisi Ideal	Kondisi Saat Ini	Kekurangan/ Kelebihan	Tindak Lanjut
Jumlah SDM sesuai persyaratan jabatan dalam anjab sebanyak 50 orang ASN baik teknis maupun administrasi	Jumlah SDM setelah adanya reorganisasi saat ini sebanyak 17 orang ASN dibantu 5 PPNPN	Masih dibutuhkan banyak SDM untuk menjalankan organisasi yang baru dengan tupoksi yang baru	Mengisi kekurangan jabatan yang ada dengan mengangkat tenaga teknis yang kompeten agar pelaksanaan pekerjaan dapat berjalan lancar
Kondisi anggaran yang mencukupi untuk melaksanakan kegiatan pada organisasi yang baru dan ketugasan yang baru	Saat ini SOTK UPT BPPMHKP belum disahkan sehingga anggaran belum dapat digunakan pada kegiatan tertentu	Masih membutuhkan kepastian sumber dana / anggaran yang dapat mendukung tujuan dan sasaran organisasi	Mendorong disahkannya SOTK yang baru agar anggaran dapat dicukupi dan segera dapat digunakan
Tercukupinya Sarana Prasarana Kerja untuk mendukung operasional di lapangan	Beberapa aset dilimpahkan kepada BKHIT	Masih membutuhkan baik alat, kendaraan operasional di lapangan agar menjangkau semua kegiatan	Mengajukan / usulan pengadaan baik alat maupun kendaraan operasional dan tanah

## BAB IV PENUTUP

### 4.1. Kesimpulan

Laporan Kinerja (LKj) Stasiun KIPM Yogyakarta Triwulan I Tahun 2025 menyajikan capaian sasaran strategis Stasiun KIPM Yogyakarta pada periode Triwulan I Tahun 2025 yang tercermin dalam capaian Indikator Kinerja. Terhadap capaian tersebut dilakukan perbandingan terhadap target triwulanan, tahunan dan juga target Renstra 2020-2024 sebagai bahan analisis dan evaluasi lebih lanjut untuk menilai keberhasilan dalam perencanaan program dan kegiatan berikutnya.

Berdasarkan hasil analisis terhadap capaian kinerja BPPMHKP Yogyakarta Triwulan I Tahun 2025 dapat disimpulkan beberapa hal, antara lain:

- Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) Stasiun KIPM Yogyakarta Triwulan I Tahun 2025 adalah 112,89
- NPSS Stasiun KIPM Yogyakarta masuk dalam kategori istimewa.
- Seluruh capaian IKU dan IK pada periode Triwulan I Tahun 2025 telah tercapai sesuai dan melebihi target Triwulan I yang ditentukan.
- Realisasi penyerapan anggaran Stasiun KIPM Yogyakarta pada triwulan I tahun 2025 mencapai Rp 892.764.035 atau sebesar 18,30% dari pagu Rp 4.877.213.000

### 4.2. Rekomendasi

- Melakukan evaluasi kinerja Stasiun KIPM Yogyakarta secara rutin (bulanan dan triwulanan) sebagai dasar dalam pengambilan kebijakan dan pelaksanaan kegiatan untuk pencapaian kinerja pada periode anggaran berikutnya
- Mengoptimalkan anggaran yang tersedia, selagi menunggu proses SOTK
- Menyiapkan ketugasan baru BPPMHKP sebagai otoritas kompeten SJMKHP dan 9 Sertifikasi
- Beberapa kegiatan dan belanja pegawai ketersediaan anggaran tidak mencukupi untuk rencana 1 tahun, perlu dilakukan revisi anggaran
- Meningkatkan kompetensi dengan mengikuti berbagai pelatihan offline maupun online
- Tetap melakukan pemeliharaan status akreditasi dan status WBK yang telah dimiliki